

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN YANG BERFOKUS PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KOTA BANGKALAN BERDASARKAN PSAP 05 DALAM SATU PERIODE

Maghfiratul Dwi Agustias¹, Adelya Rahmadhani Shafitri², Muhammad Arfansyah³, Moh. Panji Maghriba⁴, Mohamad Djasuli⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Trunojoyo Madura

Email : sfira3637@gmail.com¹, adelyarahmadhani@gmail.com², muhammadarfansyah07@gmail.com³, mohpanjimaghribaips@gmail.com⁴, djasuli@trunojoyo.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi persediaan yang ada atau yang berlaku di dalam Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Akuntansi Persediaan atau *Inventory Accounting* merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk mewujudkannya sebuah laporan keuangan yang baik bagi suatu organisasi atau perusahaan. Sistem pencatatan, penilaian, pengukuran, dan juga sekaligus pelaporan keuangan merupakan beberapa aspek yang sangat penting dalam arus sistem akuntansi persediaan yang ada di sebuah entitas atau perusahaan yang bersangkutan. Standar yang ada dalam penelitian ini yakni bisa dilihat atau telah tertuang dalam PSAP Nomor 05. Dalam penelitian ini data adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bahwasanya akuntansi persediaan yang menjadi sistem utama dalam segala bentuk perhitungan yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga perputaran dalam satu periodenya sudah melalui proses yang baik.

Kata Kunci: Akuntansi Persediaan, Standar, Sistem Akuntansi

Abstract

This research aims to find out how existing or applicable inventory accounting is treated in the Bangkalan District Education Office. Inventory Accounting or Inventory Accounting is a very important element in creating a good financial report for an organization or company. The system of recording, assessing, measuring, and also financial reporting are several very important aspects in the current inventory accounting system in an entity or company concerned. The standards in this research can be seen or have been stated in PSAP Number 05. In this research, the data is used using qualitative descriptive analysis techniques. The results of this research will show that inventory accounting, which is the main system in all forms of calculations at the Bangkalan District Education Office, is in accordance with applicable regulations and also the turnover in one period has gone through a good process.

Keywords: : *Inventory Accounting, Standards, Accounting System*

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis seperti sekarang, banyak perusahaan maupun entitas lain yang selalu memberikan kontribusi terbaiknya kepada masyarakat atau pelanggan. Baik perusahaan yang berlabel *profit oriented* ataupun *non-profit oriented*. barang masuk yang nantinya menjadi aset, baik itu aset lancar ataupun aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan atau entitas yang bersangkutan.

Suatu aset atau barang-barang yang menjadi tolak ukur harta di dalam suatu perusahaan atau entitas harus diukur, dinilai, dicatat, dan dilaporkan setiap periode. Sistem yang menghitung segala barang – barang yang tersedia di suatu perusahaan atau suatu entitas dinamakan Sistem Akuntansi Persediaan atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan *Inventory Accounting*. Pencatatan akuntansi persediaan merupakan elemen yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena sangat berguna bagi kelengkapan laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas guna untuk kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri.

Suatu perusahaan atau entitas pasti berkeinginan untuk memperoleh laba yang tinggi atau informasi yang relevan yang nantinya digunakan oleh sebagian

stakeholder ataupun para pemegang saham (investor) untuk mendukung perusahaannya agar tetap maju dan berkembang. Maka dari itu, setiap perusahaan membutuhkan akuntansi sebagai sistem pencatatan, pengukuran, penilaian, dan juga pelaporan untuk memberikan informasi terkait arus barang yang ada, baik selama satu periode berjalan ataupun periode yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Nantinya informasi yang ada tersebut digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan seperti pemilik perusahaan, para pemegang saham, dan lainnya untuk membuat keputusan ekonomi.

Akuntansi persediaan ini sangat penting yang mana untuk memudahkan perusahaan atau entitas dalam melakukan pemantauan dan mendapatkan informasi terkait barang apa saja yang masuk atau keluar dalam suatu perusahaan dalam satu periode. Tidak hanya itu, perlakuan akuntansi persediaan membantu perusahaan untuk mengetahui barang mana yang telah habis masa manfaatnya, untuk menilai kembali persediaan yang telah diperbaiki yang nantinya digunakan dan dilaporkan di laporan keuangan (Pulu, 2022).

Beberapa perusahaan pasti menggunakan sistem akuntansi persediaan ini untuk menilai barang-barang atau segala

persediaan yang ada di dalam perusahaannya atau entitasnya dalam periode berjalan. Maka dari itu, penyusun melakukan penelitian yang dimana melibatkan salah satu kantor pemerintah yakni Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk dijadikan tempat penelitian kami dalam mencari tahu atau menggali informasi terkait cara entitas tersebut melakukan atau menggunakan sistem akuntansi persediaan ini dalam satu periode. Baik dalam metode pencatatan, pengukuran, penilaian, arus keluar masuk persediaan, dan juga tentunya pelaporannya (laporan keuangan). Metode yang kami gunakan dengan menggunakan sistem wawancara atau sistem tanya jawab yang dihaturkan langsung kepada pihak akuntansi yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan agar mengetahui secara langsung terkait perlakuan akuntansi persediaan yang terjadi di sana. Maka dari itu setelah melakukan wawancara ini, penyusun sangat tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah artikel yang berjudul “**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Persediaan Yang Berfokus Pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Bangkalan Berdasarkan PSAP 05 Dalam Satu Periode**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Terdapat sebuah karakteristik dari akuntansi sendiri yakni, seperti yang telah diketahui akuntansi merupakan suatu ilmu yang didalamnya berisi identifikasi, pengukuran, dan juga mengkomunikasikan informasi keuangan terkait sebuah kegiatan ekonomi dalam suatu entitas yang ditujukan pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait. Terdapat juga pengertian akuntansi yang sebagaimana merupakan sistem informasi yang nantinya akan memberikan laporan kepada *stakeholder* atau pihak-pihak yang memiliki sebuah kepentingan terkait kinerja dan kondisi keuangan dalam sebuah entitas atau perusahaan (Tuar & Wokas, 2023). Akuntansi pula sebagai sistem informasi akuntansi (SIA) yang merupakan sebuah sistem dalam organisasi yang nantinya akan bertanggung jawab dalam penyiapan informasi-informasi yang didapat dari pengumpulan dan juga pengolahan data transaksi yang ada. Hal itu nantinya akan memiliki kegunaan bagi semua pemangku kepentingan baik dari pihak dalam perusahaan (internal) ataupun pihak luar perusahaan (eksternal).

Jenis-Jenis Akuntansi

Terdapat jenis jenis akuntansi yang ada dalam berbagai referensi jurnal,

akuntansi sendiri memiliki 8 jenis yang dimana akan memberikan ciri khas dan perlakuan tersendiri atau berbeda anantara satu dengan yang lainnya (Samaliwu, 2022). 8 jenis itu diantaranya :

1. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
2. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
3. Akuntansi Forensik (*Forensic Accounting*)
4. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
5. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*)
6. Akuntansi Pajak (*Tax Accounting*)
7. Akuntansi Sosial (*Social Accounting*)
8. Akuntansi untuk Proyek (*Project Accounting*)

Konsep Akuntansi Pemerintahan

Secara umum gambaran dari akuntansi pemerintahan sendiri merupakan bidang dalam keuangan negara (public finance), yang mengkhususkan tahapan dalam melaksanakan anggaran (budget execution), yang didalamnya telah termasuk semua pengaruh yang ditimbulkannya, baik bersifat permanen ataupun yang bersifat sementara pada semua tingkatan dalam unit pemerintahan. Akuntansi Pemerintah juga dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang didalamnya terdapat pemberian jasa

dalam menyediakan informasi terkait keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta pula penafsiran atas sebuah informasi keuangan (Lalita, 2014). Dalam sistem pemerintahan, keuangan negara yang sebagaimana telah diatur harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan konstitusi pelaksanaan fungsi tersebut dalam bentuk susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBN serta strategi dalam pembangunan yang lainnya. Hal itu, sebagaimana melaksanakan aktivitas pembangunan dan juga untuk mengendalikan atas aktivitas yang dalam rangka mentertibkan sekaligus menjaga ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Umboh & Tinangon, 2021). Dalam pelaporannya harus memenuhi beberapa karakteristik untuk berguna bagi para pemangku kepentingan, terdapat 4 karakteristik yang merupakan prasyarat normal yang diperlukan supaya laporan keuangan Pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, 4 prasyarat itu diantaranya; a) Relevan (*Relevance*), b) Andal (*Reliable*), c) Dapat Dibandingkan

(Comparable), d) Dapat Dipahami (Understandable).

Akuntansi Sektor Publik

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik sendiri merupakan sebuah cabang dari akuntansi yang berfokus pada entitas dan organisasi yang beroperasi di sektor publik. Sistem akuntansi yang dipakai atau digunakan oleh sebuah organisasi publik nantinya akan digunakan sebagai sarana pelaporan kepada publik. Pada era sekarang ini, semakin banyak perhatian yang diberikan kepada praktik akuntansi sebuah lembaga publik, baik itu menyangkut akuntan publik atau LSM publik. Masyarakat selalu mendesak setiap lembaga publik untuk memerintah secara transparan dan juga akuntabel (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021).

Sistem akuntansi sektor publik sendiri merupakan sebuah proses yang didalamnya terdapat kegiatan mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan juga melaporkan transaksi keuangan oleh instansi pemerintah atau bisa disebut kantor dinas yang sebagaimana bertujuan dalam pengambilan sebuah keputusan ekonomi guna menguntungkan semua pihak eksternal atau pihak dari luar. Sistem akuntansi sektor publik sendiri merupakan

teknik akuntansi serta terdapat mekanisme analisis yang nantinya diterapkan pada pengelolaan atas keuangan dan dana publik di lembaga negara tingkat atas maupun tingkat bawah, yang didalamnya terdiri dari pemerintah daerah, sebuah perusahaan, lembaga pemerintah, tiap-tiap industri yang berjalan di sektor publik, organisasi perusahaan, LSM dan sipil organisasi masyarakat, serta tentunya melamar proyek dianantara proyek negeri dan proyek swasta.

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup akuntansi sektor publik sendiri mencakup seluruh instansi pemerintahan dan organisasi nirlaba. Akuntansi sektor publik sendiri juga memiliki suatu hubungan yang sangat erat dengan penerapan dan juga perlakuan akuntansi sektor publik. Tidak lupa juga yang perlu diketahui, sektor publik disini memiliki cakupan atau daerah yang lebih luas daripada akuntansi swasta yang cenderung memiliki cakupan lebih sempit.

Sistem Pencatatan Akuntansi Sektor Publik

Ada beberapa sistem pencatatan atau metode pencatatan akuntansi yang umum digunakan dalam pencatatan akuntansi sektor publik ini, diantaranya:

1. Akuntansi Anggaran (*budgetary accounting*)

Akuntansi anggaran disini merupakan sebuah metode pencatatan akuntansi sektor publik yang didalamnya terdapat sebuah pendataan akuntansi distribusi pada sebuah anggaran dan tentunya juga penafsiran sebuah pendapatan dalam rangka penerapan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Tujuan utama yang dimiliki akuntansi anggaran ini yakni memberikan suatu pengawasan pada suatu anggaran. Akuntansi anggaran memberikan informasi yang tentunya bermanfaat bagi pengawasan dan juga peninjauan anggaran, sebagaimana nantinya dapat diketahui pelaksanaan penyerapan anggaran, keekonomian, efisiensi, dan juga efektivitas anggaran serta tak luput juga dengan keadaan keuangan anggaran yang dimiliki Pemerintah.

2. Akuntansi kas (*cash accounting*)

Akuntansi kas merupakan suatu metode pencatatan akuntansi sektor publik yang berisi cara atau prosedur akuntansi tertua pada sejarah akuntansi yang dilaksanakan berabad-

abad, bahkan sampai ribuan tahun yang lalu. Sampai zaman sekarang pun, akuntansi kas masih dipakai dalam sektor publik dan juga dipakai pada sebuah organisasi nirlaba. Akuntansi kas sendiri akan mencatat sebuah transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dan pembayaran sekaligus saldo kas yang ada pada buku kas.

3. Akuntansi akrual (*accrual accounting*)

Akuntansi dengan basis akrual merupakan metode pendataan, ataupun aktivitas penulisan akuntansi yang banyak dipakai serta dimanfaatkan dalam lingkup organisasi bisnis. Tetapi, sektor publik pada saat sekarang dan juga organisasi nirlaba ditujukan untuk menggunakan basis akrual ini. Terdapat tujuan yang mendasari pemakaian basis akrual ini pada akuntansi sektor publik yang dimana akan berguna dalam menetapkan biaya pada sebuah jasa dan juga dalam menetapkan harga atau tarif jasa.

4. Akuntansi dana (*fund accounting*)

Pada penerapannya, akuntansi dana dalam sebuah akuntansi pemerintahan yang sebagaimana ada di Indonesia

akan memungkinkan karena di dalam suatu sistem penganggaran dana yang ada dalam pemerintah diperoleh beberapa program yang khusus akan membutuhkan metode pencatatan akuntansi dana, sehingga sumber dan juga penggunaan dana sekaligus pertimbangan dana program ditetapkan secara terpisah. Akuntansi dana sendiri merupakan metode akuntansi yang akan memisahkan sumber daya ke berbagai jenis dana dalam menentukan suatu sumber dan penggunaan dana. Akuntansi dana sendiri memiliki tujuan sebagaimana untuk mengelola dan juga bertanggung jawab atas dana tersebut, juga menentukan posisi keuangan, merencanakan, menganggarkan, dan juga mengevaluasi kinerja yang ada.

Akuntansi Persediaan

Akuntansi persediaan (*inventory accounting*) merupakan sistem akuntansi yang dimana selalu diperlukan untuk mengawasi persediaan setiap barang yang ada pada sebuah perusahaan maupun instansi pemerintah. Mengulang dari penjelasan sebelumnya, bahwa akuntansi persediaan akan mengawasi barang yang telah habis pakai dan tentunya bisa mengatur tersedianya suatu tingkat dalam

pengadaan yang bisa memenuhi kebutuhan bahan-bahan dalam jumlah, mutu sekaligus menyangkut waktu yang tepat (Satria, 2017). Akuntansi persediaan disini juga akan memberikan pencatatan terkait arus masuk barang atau persediaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau entitas yang meliputi instansi pemerintah dan swasta dalam kurun waktu tertentu ataupun dalam satu periode akuntansi.

Sistem Pencatatan Persediaan

Terdapat dua sistem pencatatan dalam akuntansi persediaan ini, diantaranya :

1. Sistem Periodik / Fisk (*periodical inventory system*)

Dalam sistem fisik atau periodik ini, persediaan akan dicatat dengan menggunakan perhitungan secara fisik terhadap sebuah persediaan yang dimaksud. Perhitungan fisik persediaan ini dilakukan setiap periode atau periodik. Dalam sistemnya, pencatatan terhadap mutasi sebuah persediaan tidak selalu diikuti. Maka dari itu, prosedur penghitungan fisik persediaan yang nantinya di akhir periode harus dilakukan (*mandatory procedure*) untuk dapat menentukan jumlah fisik persediaan yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Nantinya,

hasil dari perhitungan fisik tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan nilai persediaan.

2. Sistem Perpetual (*perpetual inventory system*)

Pencatatan terhadap persediaan pada sistem ini akan diikuti dengan mutasi persediaan yang konsisten. Dimana nantinya, akan mencatat semua transaksi yang akan menyebabkan berkurang ataupun bertambahnya persediaan. Dengan sistem ini akan menyebabkan perhitungan fisik atas sebuah persediaan menjadi tidak wajib untuk diselenggarakan (*mandatory procedure*).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP Nomor 05 ini merupakan salah satu bentuk pernyataan Standar Akuntansi Persediaan. Terdapat tujuan dari pernyataan standar ini yang mana untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dimana dianggap untuk selalu dan perlu disajikan dalam laporan keuangan. Ruang lingkupnya meliputi penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini sebagaimana diterapkan yang fokusnya pada seluruh entitas pemerintahan. Baik itu

pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang tidak termasuk perusahaan negara ataupun daerah. PSAP Nomor 05 ini pula memberikan gambaran sekaligus penjelasan bahwasanya persediaan adalah aset yang berupa :

1. Perlengkapan (*supplies*) ataupun barang yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, seperti contoh barang yang telah habis pakai seperti alat tulis kantor, barang yang masih belum habis pakai seperti komponen peralatan dan juga globe, sekaligus menyangkut barang bekas seperti komponen-komponen bekas.
2. Perlengkapan (*supplies*) ataupun barang yang nantinya akan digunakan untuk proses produksi, misalnya bahan baku dalam pembuatan benih sekaligus bahan baku dalam pembuatan alat-alat dalam dunia pertanian.
3. Barang yang masih dalam proses produksi atau dimaksudkan nantinya akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contohnya yakni hewan serta bibit tanaman.
4. Barang-barang yang masih disimpan dan kedepannya akan dijual dan diserahkan kepada masyarakat dalam

rangka kegiatan dalam unsur pemerintahan.

Terdapat pula poin-poin penting didalam PSAP Nomor 05 ini, yang meliputi

1. Pengakuan Persediaan

Pengakuan persediaan ini dibahas di dalam PSAP Nomor 05, yakni:

- a. Disaat potensi suatu manfaat masa depan diperoleh pemerintah dan juga memiliki nilai atau biaya yang nantinya bisa diukur dengan andal
- b. Saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah
- c. Saat akhir periode akuntansi catatan atas persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

2. Pengukuran Persediaan

Pada pengukuran persediaan sendiri juga dibahas dalam PSAP Nomor 05 pada paragraf ke 15, yakni persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan suatu pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi juga dengan harga pembelian, biaya pengakuan, biaya penanganan, dan juga biaya lain yang secara langsung bisa

dibebankan pada perolehan persediaan. Hal-hal itu meliputi potongan harga, rabat, serta yang lainnya.

- b. HPP atau Harga Pokok Produksi pada persediaan apabila didapat dari memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi pada persediaan akan meliputi biaya langsung yang terkait sebagaimana persediaan itu diproduksi, dan sekaligus biaya tidak langsung yang akan dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lain misalnya donasi atau rampasan. Harga atau nilai wajar persediaan akan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar

Pada PSAP Nomor 05 sendiri, penilaian atas persediaan bisa dilakukan dengan menggunakan cara dibawah ini.

- a. Metode sistematis seperti *FIFO* (*First In First Out*) atau Rata-Rata Tertimbang.
- b. Harga atas pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan

nilainya tidak material atau bermacam-macam jenisnya.

3. Beban Persediaan

- a. Beban persediaan dihitung dan dicatat sebesar pemakaian (*use of goods*).
- b. Perhitungan beban atas persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional atau LO.
- c. Jika persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, maka pengukuran pemakaian atas persediaan akan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikali dengan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang dipakai tersebut.
- d. Jika persediaan dicatat menggunakan metode periodik atau fisik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan cek fisik, yakni dengan cara saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode yang dipakai.

4. Pengungkapan Persediaan

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang ataupun perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi, barang yang masih disimpan untuk dijual ataupun diserahkan kepada masyarakat, dan juga barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual ataupun diserahkan kepada masyarakat.
- c. Jenis, jumlah, dan juga nilai atas persediaan dalam kondisi yang rusak ataupun telah usang.

Penelitian Terdahulu

1. (Rahmawati, 2020), Evaluasi SIMDA Keuangan dan SIMBAPER Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2018-2020. Dalam artikel yang dibahas, terdapat kesimpulan bahwasanya proses atau sistem akuntansi persediaan yang terjadi pada kantor dinas pendidikan dan kebudayaan seperti layaknya perlakuan sistem akuntansi

- persediaan pada kantor dinas atau entitas pemerintahan lainnya.
2. (Tuar & Wokas, 2023), Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAP Nomor 05 Pada Klinik Pratama Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Berdasarkan penelitian tersebut, pengakuan persediaan yang terjadi pada entitas yang dibahas yakni persediaan diakui saat diterima atau hak kepemilikannya atau kekuasaannya berpindah. Pengukurannya juga menggunakan sistem *First In First Out* atau FIFO. Dan telah dibuat kesimpulan bahwasanya seluruh perlakuan akuntansi persediaan telah sesuai dengan PSAP No 05.
 3. (Lumenta et al., 2021), Akuntansi Persediaan barang Atau Perlengkapan Berdasarkan PSAP Nomor 05 Pada Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan. Hasil dari penelitiannya yakni perlakuan sistem akuntansi persediaannya telah memenuhi ketentuan dari PSAP No 05 dimana persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan telah diperoleh dan juga mempunyai nilai dan biaya yang bisa diukur dengan andal. Pengukuran persediaannya dicatat sebesar harga belinya, dan juga beban dicatat sebesar pemakaian persediaan dan disajikan di LO atau Laporan Operasional dan menggunakan sistem periodik.
 4. (Rifai & Tinangon, 2016), Evaluasi Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara. Hasil dari penelitiannya meliputi telah dilaksanakannya perlakuan akuntansi persediaan yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 05 yang mengikuti Peraturan pemerintah dalam Negeri No. 64 Tahun 2013.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif berbasis deskriptif, yakni metode yang dimana akan memfokuskan pada pengamatan yang mendalam dimana peneliti akan menggambarkan fenomena ataupun fakta yang ada di lapangan serta menggunakan penelitian yang telah dilakukan oleh banyak sumber sebagai

acuan dari hasil penelitian ini. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2020:9-10) adalah metode penelitian yang berisilandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, nantinya akan digunakan dalammeneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana nantinya sang peneliti merupakaninstrumen kunci pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan diantara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi).

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni jenis data kualitatif, tak luput juga peneliti mengandalkan data primer dan data sekunder dalam sumber informasinya. Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini melibatkan metode seperti, observasi atau pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan juga sumber sumber yang relevan atas penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, persediaan di Dinas Pendidikan ini hanya memiliki satu kategori yaitu alat tulis kantor, seperti kertas HVS, spidol, bolpen, tinta printer dan sejenisnya.

Tabel 1. Persediaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Bulan Februari 2024

Jenis Persediaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Alat Tulis Kantor	(tidak diketahui)	8.196.800,-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan (Februari 2024)

Berdasarkan dari table tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan membuat perencanaan anggaran persediaan sesuai dengan kebutuhannya di bulan-bulan berikutnya. Perhitungan tersebut dihitung berdasarkan data data sebelumnya, yang dimana persediaan di estimasikan untuk memperkirakan persediaan di bulan-bulan berikutnya. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 5 menyatakan bawah pemerintah menyimpan barang untuk kebutuhan operasional merupakan bentuk dari persediaan.

Pengakuan Persediaan

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan mengakui suatu persediaan pada saat persediaan barang telah benar-benar tiba di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan beserta dengan kelengkapan dokumennya, seperti adanya dokumen yang memuat nilai atau harga, agar dapat diukur secara andal dan dapat diverifikasi. Jadi selama persediaan belum tiba di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tidak akan diakui sebagai bentuk persediaan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemrintah (PSAP) Nomor 5 persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan

diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung dengan adanya bukti atau dokumentasi yang dapat diverifikasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan juga melakukan pengecekan fisik disetiap barang sampai dan jika ada barang yang rusak maka akan langsung diretur dan ditukar dengan barang dengan kondisi yang bagus agar tidak mempengaruhi persediaan.

Pengukuran Persediaan

Berdasarkan hasil penelitian, persediaan alat tulis kantor yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sudah merinci dalam *e-catalog*. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan akan membayar barang jika barang tersebut jika telah sesuai dengan kriteria dan datang terlebih dahulu. Untuk pelaporan barang akan diungkapkan sesuai dengan harga yang diperoleh, karena barang tersebut didapatkan melalui *e-catalog* atau pun pihak luar. Pengukuran persediaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan yaitu menggunakan metode FIFO (First In First Out) dimana setiap persediaan yang masuk pertama itu juga yang digunakan atau dikeluarkan pertama, hal tersebut bertujuan untuk mengurangi resiko kerusakan atau keusangan terhadap persediaan yang ada.

Perolehan persediaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan diperoleh dengan pembelian, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan mengikuti atau menggunakan harga pembelian terakhir dari dokumen-dokumen yang dikirimkan bersamaan dengan persediaan yang dipasok, dokumen yang dimaksud yaitu dokumen yang memuat nilai atau harga dari persediaan yang dibeli.

Beban Persediaan

Beban persediaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dicatat menggunakan metode periodik yaitu akan dilakukan pencatatan pada saat terjadi transaksi. Beban persediaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sebesar pemakaian atau saat persediaan digunakan, dan perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka untuk penyajian laporan operasional.

Sistem Pencatatan Persediaan

Sistem pencatatan persediaan yang digunakan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan adalah Metode Perpetual. Dinas tersebut akan langsung mencatat transaksi persediaan baik itu pembelian bersekala besar dengan menggunakan *E-Catalog* dan skala kecil dengan membelinya secara langsung ke

toko tersebut, hal tersebut didukung dengan diterbitkannya nota atau bukti pembelian. Pencatatannya pun akan di rangkum berdasarkan bulannya, sehingga setiap transaksi persediaan yang ada pada tiap harinya akan dimasukan atau digolongkan pada bulan pembeliannya.

Pengungkapan Persediaan

Pengungkapan persediaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan yaitu mengungkapkan persediaan barang yang masuk dan keluar langsung dicatat dalam buku penerimaan barang dan buku pengeluaran barang. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan juga mengungkapkan persediaan barang yang digunakan yaitu untuk membantu kegiatan operasional pemerintahan atau pada suatu instansi, yang pastinya persediaan barang di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan akan digunakan untuk menyukseskan kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bangkalan. Pengungkapan persediaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan diungkapkan dalam buku penerimaan barang dan buku pengeluaran barang, surat bukti barang keluar dan surat bukti barang masuk, laporan operasional, dan dalam laporan keuangan disajikan di laporan neraca. Dinas Pendidikan Kabupaten

Bangkalan tidak mengungkapkan adanya laporan pencatatan terhadap persediaan dalam kondisi rusak karena langsung melakukan retur dan penggantian barang (pengecekan secara menyeluruh sebelum barang dinyatakan masuk).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan akuntansi atas persediaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05 tentang akuntansi persediaan. Pengakuan persediaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dapat diakui apabila barang persediaan sudah benar benar diterima dan sesuai dengan permintaan yang dipesan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 05. Pengukuran persediaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 05. Beban persediaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan telah mengikuti Standar Yang berlaku dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 05. Sistem pencatatan persediaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan telah sesuai dengan Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 05. Pengakuan persediaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 05 Paragraf 26, PP No 71 tahun 2010.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlakuan akuntansi persediaan atau pengelolaan persediaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, maka penulis memberikan saran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan pengelolaan persediaan, tetap berpedoman pada PSAP yang berlaku, agar dapat mempertahankan efektivitas penerapan pengelolaan persediaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dalam hal pengakuan persediaan, pengukuran persediaan, beban persediaan, dan pengungkapan persediaan, dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan khususnya menyangkut laporan persediaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

DAFTAR PUSTAKA

Lalita, E. (2014). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Lumenta, C. P., Morasa, J., & Pinatik, S. (2021). Akuntansi Persediaan Barang Atau Perlengkapan Berdasarkan PSAP Nomor 05 Pada Kantor Kepolisian Resor Bolang Mongondow Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(1), 146–154.

Nevi Costari, & Putri Ariella Belinda. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421

Pulu, E. (2022). Evaluasi Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi ...)*, 6(1), 85–94. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/41357%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/download/41357/37229>

Rahmawati, R. N. (2020). *Mengacu pada Peraturan Pemerintah*.

Rifai, R., & Tinangon, J. (2016). Evaluasi

- Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 11–19.
- Samaliwu, T. H. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum ...*, 5(2), 1065–1072. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/40288%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/download/40288/36367>
- Satria, M. R. (2017). Analisis Sistem Akuntansi Persediaan. *Jurnal Logistik Bisnis*, 7(1), 90–95.
- Tuar, S. W., & Wokas, H. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan Berdasarkan Psap Nomor 05 Pada Klinik Pratama Kantor Gubernur Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 18(3), 202–211.
- Umboh, A. D., & Tinangon, J. J. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No. 5 pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(5), 967–974.